

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintahan dilingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh, pada organisasi sektor swasta. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi, baik bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, juga informasi bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Kepentingan pengguna laporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi disemua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMD).

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kabupaten Sintang (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020) ?”

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian supaya masalah yang diteliti mempunyai arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu :

1. Menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2019.
2. Jenis laporan yang akan dianalisa terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Penyajian Laporan Keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP No. 01.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan sudah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana, mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam membentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan Lembaga pengelolaan profesi, instansi, dan/perusahaan dalam meningkatkan kualitas lulusnya.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yaitu dengan penelitian ini dapat membantu instansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAP.

3. Bagi mahasiswa, memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan diri sendiri terhadap teori serta pengaplikasiannya di dunia kerja atau dengan kata lain dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Bab. I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.
2. Bab. II Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir: Bab ini mengenai kajian pustaka atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.
3. Bab. III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran: berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.